



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-107/S/KTLN/LN.03.00/05/2023

9 Mei 2023

Sifat : Sangat Segera

Hal : Penawaran Beasiswa Master's Degree TIPP 2023 oleh
Pemerintah Thailand

Yth. Pejabat terlampir
di tempat

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan tawaran 19 (sembilan belas) program beasiswa *master's degree* dalam kerangka *Thailand Intemational Postgraduate Programme* (TIPP) 2023 yang akan dilaksanakan di Thailand. Program ini merupakan salah satu program peningkatan kapasitas dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand di berbagai bidang studi yang ditawarkan.

Program-program yang ditawarkan terbagi dalam 6 (enam) tema utama yakni *Sufficiency Economy Philosophy* (SEP), perubahan iklim dan lingkungan, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, *Bio-Circular-Green Economy Model* (BCG), dan topik lainnya terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lebih lanjut, Pemerintah Thailand akan menanggung biaya sehubungan dengan beasiswa tersebut, antara lain biaya pendidikan, tiket penerbangan internasional dan domestik (di thailand) kelas ekonomi p.p., asuransi, uang saku bulanan dan tunjangan akomodasi, tunjangan kedatangan, tunjangan buku dan tesis. Informasi terkait penawaran beasiswa tersebut yakni panduan/tata cara pendaftaran, *application forms*, dan detail program studi yang ditawarkan oleh masing-masing universitas dapat di akses melalui tautan www.tinyurl.com/TIPP2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya masing-masing instansi dapat mengajukan 2 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk setiap program studi sebagai kandidat penerima beasiswa yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program beasiswa. Adapun persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan bidang studi yang dipilih.
Mohon diperhatikan persyaratan masing-masing universitas
2. Mahir berbahasa inggris lisan dan tulisan
3. Berusia tidak lebih dari 45 tahun
4. Sehat secara fisik dan mental (bagi calon peserta yang sedang hamil belum dapat mendaftar beasiswa)

5. Pencalonan peserta **wajib melampirkan berkas administrasi dalam bahasa inggris (kecuali poin a)** sebagai berikut:
- Surat pengantar/rekomendasi dari *focal point* masing-masing instansi yang ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg. Bagi instansi daerah harap mengecek alur koordinasi instansi kementerian/lembaga pusatnya;
 - Daftar riwayat hidup;
 - TIPP application form* (dapat diunduh melalui tautan <https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/page/75500-tipp-application-form?menu=605b13dbb6f1b76ed31778b3>);
 - TICA medical report form* (apabila kandidat menyampaikan surat keterangan sehat lainnya tanpa melampirkan *TICA medical report form*, maka aplikasi anda tidak akan diterima);
 - Salinan transkrip akademik/nilai jenjang pendidikan sarjana;
 - Salinan ijazah jenjang pendidikan sarjana;
 - 2 *Recommendation Letter* (1 orang per surat) yang berasal dari dosen/atasan pada unit kerja kandidat;
 - Sertifikat Bahasa Inggris terbaru TOEFL/IELTST sesuai dengan persyaratan program studi dan universitas tujuan pilihan anda;
 - Seluruh dokumen kelengkapan sesuai detail program studi dan universitas tujuan pilihan anda.
6. Guna proses *endorsement/government nomination* oleh Biro KTLN Kemensetneg, kandidat wajib mengunggah *soft copy* seluruh berkas persyaratan (poin 5a-5i) ke dalam *Google Drive* masing-masing kandidat dan mengisi tautan https://bit.ly/Endorsement_TIPP paling lambat tanggal **25 Juli 2023**, serta menginfokan kepada PIC Biro KTLN Kemensetneg melalui e-mail ktssbilateralsetneg@gmail.com. Apabila kandidat tidak menyampaikan seluruh berkas persyaratan yang sesuai program informasi universitas tujuan dan surat penawaran Kemensetneg pada batas waktu yang ditentukan (25 Juli 2023) maka permohonan *endorsement/government nomination* kandidat **tidak dapat diproses lebih lanjut**
7. Mengirimkan 1 rangkap dokumen asli dan 2 rangkap salinan kelengkapan dokumen (sebagaimana persyaratan no. 5b-5i) kepada Kedutaan Besar Kerajaan Thailand via pos/langsung paling lambat tanggal **31 Juli 2023** pukul 17.00.

Mohon dapat membaca *Guideline for Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)*, detail program studi universitas tujuan anda, dan informasi/panduan terkait kelengkapan persyaratan pendaftaran masing-masing universitas tujuan dengan seksama guna menghindari kesalahan prosedur dan kekurangan berkas. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui e-mail kstbilateral@setneg.go.id dan ktssbilateralsetneg@gmail.com dengan subjek "TIPP 2023", serta website resmi Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg <https://ktln.setneg.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar
Negeri,



Noviyanti

Lampiran 1 Surat Dinas

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri

Nomor : B-107/S/KTLN/LN.03.00/05/2023

Tanggal : 9 Mei 2023

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT DINAS

1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat
5. Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. Sekretaris Jenderal, Mahkamah Konstitusi
7. Sekretaris Jenderal, Komisi Yudisial
8. Sekretaris Jenderal, Badan Narkotika Nasional
9. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemberantasan Korupsi
10. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian , Badan SAR Nasional
12. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional
13. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
15. Sekretaris Utama, u.p. Kepala Biro, Hukum, SDM dan Organisasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16. Sekretaris Utama, Arsip Nasional Republik Indonesia
17. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal
18. Sekretaris Jenderal, Ombudsman Republik Indonesia
19. Sekretaris Jenderal, u.p. Dirkersin Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan
20. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
21. Sekretaris Jenderal, u.p. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
23. Sekretaris Utama, u.p. Kepala OSDM, Badan Siber dan Sandi Negara
24. Sekretaris Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian
25. Kepala Badan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
26. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
27. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet
28. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

30. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
32. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
33. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
34. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
35. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
36. Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri
37. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
38. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
39. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
40. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
41. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
42. Kepala Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan
43. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
44. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Kementerian Keuangan
45. Kepala Pusat Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan, Komisi Pemilihan Umum
46. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
47. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
48. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri
50. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
51. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
52. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
54. Kepala Badan Pengembangan SDM, Kementerian Perhubungan
55. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian
56. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
57. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pemeriksa Keuangan
58. Kepala Biro Humas dan Protokol, Mahkamah Agung
59. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
60. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional KKB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
61. Kepala Pusat Penerangan, Tentara Nasional Republik Indonesia
62. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia
63. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara
64. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Meteorologi dan Geofisika
65. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
66. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum, Badan Informasi Geospasial
67. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

68. Kepala Biro Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik
69. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Lembaga Administrasi Negara
70. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
71. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
72. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan Nasional

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar
Negeri,



Noviyanti